

Pengaruh Pengelolaan Keuangan dan Pemahaman Sistem Informasi Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Miftahul Khairah^{1*}, Andika Rusli², Rifqa Ayu Dasila³

^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Palopo

*Email Korespondensi: miftahulkhairah283@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 13-09-2025

Revision: 30-09-2025

Published: 30-09-2025

DOI Article:

10.24905/permana.v17i3.1183

A B S T R A K

Pengelolaan keuangan dan pemahaman sistem informasi pemerintah daerah yang kurang efektif menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kurang berkualitaskannya laporan keuangan. Hal ini menyebabkan ketidakefisienan dan kesalahan dalam pengimputan data serta kurangnya integrasi informasi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan dan pemahaman sistem informasi pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 40 pegawai Kantor BPKAD Kota Palopo sebagai responden yang dipilih melalui Teknik Purposive Sampling. Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, serta pengujian hipotesis melalui perangkat lunak IBM SPSS statistics versi 27. Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan serta pemahaman sistem informasi pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menekankan pentingnya pengelolaan keuangan dan pemahaman sistem informasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Kata kunci: Pengelolaan Keuangan, Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Kualitas Laporan Keuangan, Teori *Stewardship*

A B S T R A C T

Ineffective financial management and understanding of local government information systems is one of the factors that affect the poor quality of financial reports. This causes inefficiencies and errors in data entry and lack of information integration. Thus, this study aims to determine the effect of financial management and understanding of local government information systems on the quality of

Acknowledgment

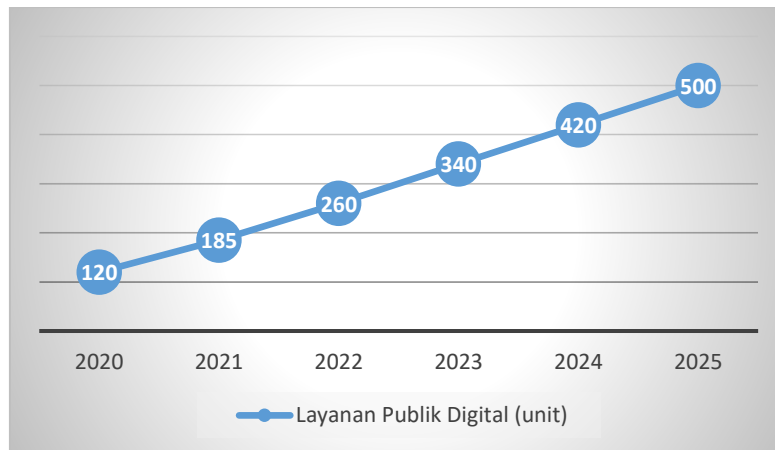
financial reports at the Office of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Palopo City. This study uses a quantitative approach by distributing questionnaires to 40 employees of BPKAD of Palopo City as respondents selected through Purposive Sampling Technique. Data analysis was carried out using data quality tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing through IBM SPSS statistics version 27 software. The research shows that financial management has a significant effect on the quality of financial statements and understanding of local government information systems has a significant effect on the quality of financial statements. This research emphasizes the importance of financial management and understanding of local government information systems in improving the quality of financial statements.

Keywords: *Financial Management, Local Government Information System, Quality of Financial Statements, Stewardship Theory*

© 2025 Published by Permana. Selection and/or peer-review under responsibility of Permana

PENDAHULUAN

Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi informasi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hampir di seluruh bidang kehidupan manusia baik dalam kehidupan sehari – hari maupun organisasi tidak lepas dari teknologi dan informasi (Rusli & Dasila, 2024). Teknologi Informasi (TI) semakin penting bagi keberhasilan organisasi secara keseluruhan memperluas peran dan fungsi sistem informasi. Adanya penggunaan TI dalam pengelolaan pemerintah, otomatis juga menuntut para aparatur untuk mengubah dalam menyelesaikan pekerjaannya dari secara manual menuju komputerisasi. Semakin banyak dan rumitnya tugas para pengelola keuangan daerah, kebutuhan akan penggunaan teknologi informasi menjadi suatu keharusan. Maka dengan demikian dapat dipastikan bahwa tugas pengelola keuangan jauh lebih banyak dan rumit dibandingkan peraturan sebelumnya. Terlaksananya penggunaan teknologi informasi, tugas – tugas para pengelola keuangan daerah akan semakin terbantu dan dapat menghasilkan laporan – laporan yang dibutuhkan oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara akurat dan tepat waktu (Lotu, 2022).



Gambar 1. Layanan Publik Digital di Daerah

Sumber: data diolah (2025)

Grafik perkembangan layanan publik digital di daerah pada periode 2020–2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada awal periode, jumlah layanan publik digital masih relatif rendah yaitu sebanyak 120 unit pada tahun 2020. Namun, angka tersebut terus mengalami kenaikan seiring dengan dorongan transformasi digital, menjadi 185 unit pada tahun 2021 dan meningkat lagi hingga 260 unit pada tahun 2022.

Memasuki tahun 2023, layanan publik digital mencapai 340 unit, mencerminkan adanya percepatan digitalisasi yang lebih luas. Kenaikan ini berlanjut pada tahun 2024 dengan jumlah 420 unit, hingga akhirnya mencapai puncaknya pada 2025 sebesar 500 unit. Pertumbuhan yang stabil setiap tahunnya menunjukkan adanya perhatian yang serius dari pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan publik berbasis digital.

Secara keseluruhan, grafik tersebut mengindikasikan bahwa perkembangan layanan publik digital tidak hanya meningkat dari sisi kuantitas, tetapi juga mencerminkan adanya komitmen dalam mewujudkan pelayanan yang lebih mudah diakses, efisien, dan transparan. Digitalisasi ini menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan modern serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Informasi yang berkualitas memerlukan pengelolaan keuangan yang didukung oleh prosedur pelaporan keuangan yang tepat dan memadai sesuai dengan peraturan pelaporan keuangan daerah dan sistem informasi akuntansi keuangan (Setyobudi, 2022). Untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas, penting untuk memahami sistem akuntansi pemerintah daerah untuk menghindari kecurangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

70 Tahun 2019 mengatur sebuah sistem yang terhubung dan terintegrasi dalam satu sistem, yakni SIPD yang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut BPK RI, SIPD diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah dan mampu menghubungkan kebutuhan satu data keuangan seluruh daerah secara nasional.

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya ekonomi oleh suatu entitas berupa informasi keuangan yang harus tersaji secara akurat, tepat sasaran, tepat waktu dan dapat dipercaya (Dewi et al., 2023). Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah daerah membutuhkan sistem yang mampu dalam menyediakan kemudahan, yaitu sistem yang mampu mengelola data dengan akurat, transparan, dan terstruktur untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat (Nurpala & Arrozi, 2023). Sistem yang dapat mengolah data dengan akurat, transparan, dan terstruktur akan membantu pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan efisien. Dengan informasi bermanfaat yang dihasilkan, pemerintah daerah dapat merencanakan program dan kebijakan yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Wulandari & Yuliati, 2023). Selain itu, sistem yang efisien juga akan meningkatkan kinerja dan keefektifan penyelenggaraan pelayanan publik bagi warga masyarakat.

SIPD dibuat untuk memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan harus responsif, fleksibel, progresif, inovatif, dan bertanggungjawab (Sulaeman et al., 2022). SIPD yang memenuhi kriteria responsif akan dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang berubah – ubah dalam lingkungan pemerintahan yang dinamis. Fleksibilitas sistem tersebut memungkinkan adopsi teknologi baru dan integrasi dengan sistem yang sudah ada untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional (Anjani et al., 2024). Namun, sering terdapat ketidaksesuaian antara data yang dimasukkan ke dalam sistem dan hasil akhir, yang mengharuskan verifikasi manual oleh pembuat laporan keuangan. SIPD sebagai bagian integral dari *e-government* memiliki peranan kritis dalam perencanaan pembangunan daerah untuk menciptakan pemerintahan yang responsif terhadap tantangan lokal, meningkatkan partisipasi dan demokrasi dalam proses perencanaan daerah, serta mempromosikan transparansi dan akuntabilitas publik (Nurpala & Arrozi, 2023).

Pengelolaan keuangan yang kurang efektif menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi kurang berkualitasnya laporan keuangan. Kurang efektifnya laporan keuangan

disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, pelatihan, monitoring dan evaluasi. Penelitian oleh Ariyani et al., (2021), menunjukkan bahwa lebih dari 30% pemerintah daerah mengalami kendala dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dan tepat waktu. Pelaksanaan pengelolaan keuangan yang tidak optimal dapat menyebabkan ketidakefisienan serta kesalahan dalam pelaporan. Dengan tingkat pengetahuan keuangan yang rendah di kalangan pegawai, permasalahan ini menjadi semakin kompleks. Di sisi lain, pemahaman terhadap SIPD juga memiliki peran penting dan dirancang untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan (Anjani et al., 2024). Namun hasil penelitian Indriana, (2020) menunjukkan bahwa hanya berkisar 45% pegawai pemerintah daerah yang merasa mempunyai kemampuan yang cukup dalam memakai sistem ini secara efektif. Ketidakmampuan ini menimbulkan kesalahan dalam pengimputan data, kurangnya integrasi informasi yang pada akhirnya berkontribusi terhadap rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sulawesi Selatan adalah salah satu dari 34 provinsi di Indonesia yang telah memberlakukan penggunaan SIPD dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkup pemerintah. Dalam lingkup pemerintahan di Sulawesi Selatan, OPD telah mulai menggunakan SIPD ini mulai tahun 2020. Kota Palopo menjadi salah satu Kota yang menerapkan penggunaan SIPD dalam menunjang pekerjaan di tiap OPD yang ada. Sejak pengumuman pemberlakuan. SIPD di Kota Palopo pada tahun 2020, masih banyak OPD yang belum menerapkan penggunaan SIPD, terkhusus di BPKAD Kota Palopo sebagai pengelola keuangan di Kota Palopo. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh (Adolph, 2022) dengan salah satu pegawai di BPKAD Kota Palopo, ditemukan permasalahan bahwa penggunaan SIPD masih belum banyak diberlakukan. Hal ini dikarenakan pengalihan data dari aplikasi sebelumnya ke SIPD belum banyak ditindaklanjuti disebabkan karena banyak dari bendahara penerima yang belum paham mengenai tahap penatausahaan di aplikasi SIPD.

Penelitian ini berupaya untuk mengisi gap yang ada dalam penelitian yang menunjukkan bahwa meskipun ada kajian yang membahas secara terpisah mengenai pengelolaan keuangan dan pemahaman sistem informasi pemerintah daerah, kedua mekanisme ini masih jarang diangkat. Penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan menggabungkan kedua variabel dan mengeksplorasi bagaimana pengelolaan keuangan yang baik dan pemahaman yang memadai terhadap SIPD saling berpengaruh dan berkontribusi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam pengaruh pengelolaan keuangan dan pemahaman SIPD terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini akan dilakukan di BPKAD Kota Palopo dan diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan pemahaman Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) serta memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur mengenai hubungan antara pengelolaan keuangan, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan kualitas laporan keuangan di tingkat daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan objek penelitian meliputi pengelolaan keuangan dan pemahaman SIPD. Adapun subjek dalam penelitian ini para adalah pegawai yang bekerja pada BPKAD. Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya tanpa melalui perantara yang berupa respon dari kuesioner yang diisi oleh responden. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai BPKAD Kota Palopo yang berjumlah 106. Kriteria yang dijadikan dasar pemilihan sampel pada penelitian ini meliputi pegawai bagian akuntansi dan pelaporan serta bagian anggaran yang telah bekerja minimal satu tahun di BPKAD. Besarnya jumlah sampel sebanyak responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling*, dengan pendekatan sampling jenuh, setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menganalisis informasi tersebut dan menguji hipotesis yang diajukan. Metode yang digunakan untuk pengujian data dan hipotesis adalah SPSS, dengan bantuan perangkat lunak IMB SPSS *Statistics versi 27* untuk menganalisis hubungan antar variabel. Pengujian menggunakan metode tersebut dengan penyangga keamanan 5%.

Hipotesis

- H1: Pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
- H2: Sistem informasi pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

HASIL

Hasil Uji Validitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	Koefisien Korelasi	r Tabel (N=32)	Keterangan
Pengelolaan Keuangan	X1P1	1	0,349	Valid
	X1P2	0,506	0,349	Valid
	X1P3	0,629	0,349	Valid
	X1P4	0,429	0,349	Valid
	X1P5	0,440	0,349	Valid
	X1P6	0,463	0,349	Valid
	X1P7	0,666	0,349	Valid
	X1P8	0,476	0,349	Valid
	X1P9	0,613	0,349	Valid
Pemahaman Sistem Informasi Pemerintah Daerah	X2P1	1	0,349	Valid
	X2P2	0,785	0,349	Valid
	X2P3	0,370	0,349	Valid
	X2P4	0,538	0,349	Valid
	X2P5	0,411	0,349	Valid
	X2P6	0,357	0,349	Valid
	X2P7	0,453	0,349	Valid
	X2P8	0,667	0,349	Valid
	X2P9	0,437	0,349	Valid
	X2P10	0,481	0,349	Valid
Kualitas Laporan Keuangan	Y1	1	0,349	Valid
	Y2	0,789	0,349	Valid
	Y3	0,594	0,349	Valid
	Y4	0,354	0,349	Valid
	Y5	0,500	0,349	Valid
	Y6	0,707	0,349	Valid
	Y7	0,691	0,349	Valid
	Y8	0,726	0,349	Valid
	Y9	0,743	0,349	Valid
	Y10	0,748	0,349	Valid
	Y11	0,741	0,349	Valid
	Y12	0,831	0,349	Valid
	Y13	0,714	0,349	Valid
	Y14	0,709	0,349	Valid

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2025

Berdasarkan hasil uji validitas bahwa item pertanyaan sudah memenuhi syarat dimana koefisien korelasi lebih besar dibandingkan nilai r tabel sebesar 0,349. Pada variabel kualitas laporan keuangan seluruh butir pertanyaan yang terdiri dari empat belas pertanyaan yang diajukan valid, hal ini disebabkan karena koefisien lebih besar dibandingkan nilai r tabel

sebesar 0,349.

Uji Realibilitas

Tabel 2. Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N Koefisien = 0,6	Keterangan
Pengelolaan Keuangan	0,748	0,60	Reliable
Pemahaman SIPD	0,848	0,60	Reliable
Kualitas Laporan Keuangan	0,761	0,60	Reliable

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2025

Jika nilai koefisien alpha $> 0,60$ maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut handal dan reliabel. Hasil uji realibilitas dapat menunjukkan bahwa ketiga variable diatas diatas 0,60 yang berarti beliabel.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.12020337
Most Extreme Differences	Absolute	.067
	Positive	.067
	Negative	-.063
Test Statistic		.067
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.922
	99% Confidence Interval	Lower Bound .916
		Upper Bound .929

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2025

Berdasarkan hasil pengolahan data uji normalitas diperoleh nilai Asymp. Sig sebesar $0,200 > 0,05$. Dengan demikian data dapat dikatakan berdistribusi normal dan layak untuk dilakukan pengujian yang lebih lanjut.

Uji Multikolinearitas

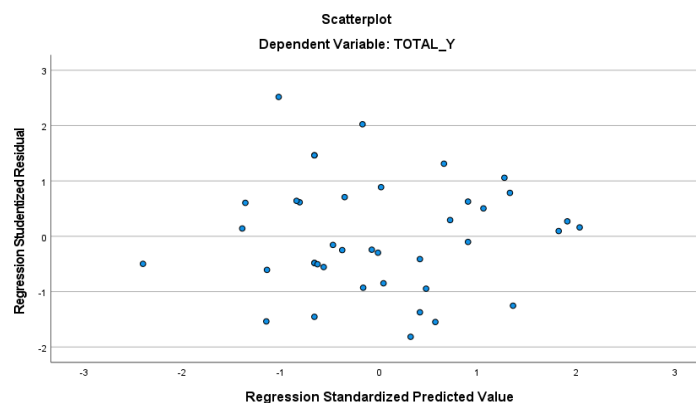
Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Tolerance	Statistic VIF
1 (Constant)		
Pengelolaan Keuangan	.858	1.166
Pemahaman SIPD	.858	1.166

Sumber: Data olahan Peneliti, 2025

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* untuk variabel Pengelolaan Keuangan dan Pemahaman Sistem Informasi Pemerintah Daerah masing – masing > 0,100 dengan nilai 0, 858. Selain itu, nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) untuk setiap variabel juga kurang dari 10 dengan nilai 1,166. Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tidak mengalami multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2025

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, titik – titik yang tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y tidak membentuk pola yang jelas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bebas dari Heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$				
	Coefficient	t-hitung	Sig.(p-value)	Keterangan
(Constant)	19,989	2,062	0,046	
Pengelolaan Keuangan	0,109	4,460	0,001	Signifikan

$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$				
	Coefficient	t- hitung	Sig.(p- value)	Keterangan
Pemahaman SIPD	0,851	4,574	0,000	Signifikan
F-Value 13,242				
p-Value (Uji F) 0,001				

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2025

Analisis model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 19,989 + 0,109 (X_1) + 0,851 (X_2)$$

Dimana:

X_1 = Pengelolaan Keuangan

X_2 = Pemahaman Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Y = Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

- 1) Hasil persamaan regresi, nilai konstanta sebesar 19,989, artinya pengelolaan keuangan dan pemahaman sistem informasi pemerintah daerah dianggap konstan maka tingkat kualitas laporan keuangan konstan sebesar 19,989.
- 2) Koefisien regresi variabel pengelolaan keuangan sebesar 0,109 yang mengindikasikan bahwa setiap peningkatan 1% pada variabel tersebut akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan sebesar 0,109 dengan catatan bahwa nilai variabel independen lainnya konstan.
- 3) Koefisien regresi variabel pemahaman SIPD sebesar 0,851 artinya bahwa setiap peningkatan 1% pada variabel tersebut akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan sebesar 0,851 dengan catatan bahwa nilai variabel independen lainnya konstan.

Berdasarkan uji F diperoleh nilai sebesar 13,242 dengan tingkat signifikansi 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen pada tingkat signifikansi 5%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel pengelolaan keuangan dan pemahaman sistem informasi pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan Uji T dapat disimpulkan mengenai hasil uji hipotesis secara parsial dari masing – masing variabel independen sebagai berikut:

1. Nilai T-hitung untuk variabel pengelolaan keuangan adalah $4,460 > T\text{-tabel } 1,68595$

($df = n - k = 40 - 2 = 38$) dan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari nilai toleransi yaitu sebesar 0,05. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel Pengelolaan Keuangan memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Nilai T-hitung untuk variabel pemahaman SIPD adalah $4,574 > T\text{-tabel } 1,68595$ ($df = n - k = 40 - 2 = 38$) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari nilai toleransi yaitu sebesar 0,05. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman SIPD memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pembahasan

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan uji yang telah dilakukan, ditemukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pengelolaan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan. Apabila pengelolaan keuangan semakin baik, maka tingkat kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kota Palopo juga akan semakin tinggi. Berarti bahwa kedua variabel tersebut memang terdapat pengaruh yang signifikan. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, penggunaan anggaran menjadi lebih tepat dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga laporan keuangan yang disusun menjadi lebih berkualitas.

Indikator yang paling dominan dalam membentuk variabel pengelolaan keuangan adalah pencapaian target keuangan. Pencapaian target keuangan merupakan aspek inti dari pengelolaan keuangan yang paling berdampak pada kualitas laporan keuangan. Indikator ini secara langsung menunjukkan sejauh mana pelaksanaan anggaran dilakukan dengan baik sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. Ketika suatu organisasi mampu mencapai target keuangan yang telah direncanakan, maka hal itu menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan berjalan secara optimal.

Penelitian ini didukung oleh teori *stewardship* di mana teori ini menjelaskan tentang hubungan antara *steward* dan *principals*. Teori ini lebih lanjut menjelaskan tentang kebutuhan informasi keuangan antara pihak manajemen dengan pihak pemangku kepentingan atau pemegang saham. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Setyobudi, (2022) dan Vidyasari & Suryono, (2021) mengungkapkan bahwa pengelolaan

keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Pemahaman Sistem Informasi Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan uji yang telah dilakukan, hasil yang diperoleh adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan pemahaman sistem informasi pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin baik pemahaman tentang sistem informasi pemerintah daerah maka semakin baik juga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Sebaliknya semakin kurang pemahaman pegawai terhadap sistem informasi pemerintah daerah maka kualitas laporan keuangan mereka akan memburuk.

Indikator yang paling dominan dalam membentuk variabel pengelolaan keuangan adalah keamanan data. Keamanan data merupakan aspek inti dari pemahaman SIPD yang paling berdampak pada kualitas laporan keuangan. Hal ini disebabkan SIPD menyimpan informasi yang bersifat sensitif seperti laporan keuangan daerah. Semakin baik pemahaman terhadap aspek keamanan data maka semakin baik pula kemampuan pengguna dalam menggunakan SIPD secara tepat dan bertanggungjawab.

Penelitian ini juga sejalan dengan teori stewardship dimana teori ini menjelaskan tentang hubungan antara steward dan principals. Teori ini lebih lanjut menjelaskan tentang kebutuhan informasi keuangan antara pihak manajemen dengan pihak pemangku kepentingan atau pemegang saham. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vidyasari & Anjani et al., (2024) dan Adolph, (2022) yang menyatakan bahwa pemahaman sistem informasi pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan dan dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan dan pemahaman sistem informasi pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang kompeten dan sistem informasi pemerintah daerah yang terintegrasi dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia dan teknologi informasi saling melengkapi dalam menciptakan laporan keuangan yang lebih berkualitas. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan dapat dicapai melalui penguatan kompetensi penge-

lolaan keuangan serta pemahaman sistem informasi pemerintah daerah dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2022). Optimalisasi Pelaporan Pendapatan Daerah Melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Di Kota Palopo Sulawesi Selatan. 1–23.
- Ariyani, R., Suharto, S., & Yuliantini, Y. (2021). Pengaruh Kepemimpinan, Kompensasi Dan Disiplin Terhadap Kinerja Personel Di Kesatuan Disdik. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 509–518. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i2.591>
- Dewi, N. K. N. P., Sasanti, E. E., & Kartikasari, N. (2023). Pengaruh Pengelolaan Keuangan dan Pemahaman Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Terhadap Kualias Laporan Keuangan. *Businessand Economics Conference in Utilization of ModernTechnology*, 191–202. www.bpk.go.id
- Herindraningrum, F. F., & Yuhertiana, I. (2021). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia : Literature Review. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 12(2), 157–171. <https://doi.org/10.18860/em.v12i2.12287>
- Indriana. (2020). Analisis Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Surat Izin Penelitian Mahasiswa Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru. *Kaos GL Dergisi*, 8(75), 147–154. <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798>
- Kasram, M. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu. 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Leunupun, P., Persulesy, G., & Souhuwat, M. Y. (2022). Pengelolaan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Owner*, 6(3), 1364–1376. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.884>
- Lotu, M. N. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Sipkd) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Setda Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 10(2), 79–88. <https://doi.org/10.35508/jak.v10i2.8719>
- Mustaqmah, S. A., & Putri, D. P. (2022). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Dan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simd) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi. *Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 8(2), 181–197. <https://doi.org/10.31869/me.v8i2.3738>
- Nurpala, & Arrozi. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan

- Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA), 11(2), 187–201.
- Rosiana Anjani, N. A., Sudrajat, A., & Bayu Framesthi, D. (2024). Pengaruh Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kecamatan Cicalengka. 18(April).
- Rusli, A., & Dasila, R. A. (2024). *The Influence Of Financial Literacy And The Use Of Information Technology On The Net Profit Margin Of Msmes In Palopo City*. 1(1), 2164–2174.
- Setyobudi, S. (2022). Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan, Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS), 3(3), 502–509. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i3.1281>
- Subetti, V., Patra, A. D. A., & Hamid, R. S. (2019). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara). 44(8), 1–92.
- Sulaeman, M. M., Ruswaji, R., & Cahyono, P. (2022). Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepuasan Anggota Pengguna Jasa Koperasi Simpan Pinjam Artha Niaga Sentosa Surabaya. Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS), 3(4), 892–895. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1572>
- Vidyasari, F. N., & Suryono, B. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 10(4), 1–24.
- Wulandari, A. D., & Yuliati, A. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jember). *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(1), 637–649. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.6217>